



**ANALISIS**

**ANAK TIDAK SEKOLAH**

**USIA 7-18 TAHUN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jakarta, 2016**



UKAS is a member of Registrar of Standards, Jhalakpati, India.



**ANALISIS ANAK TIDAK SEKOLAH  
USIA 7-18 TAHUN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jakarta, 2016**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun.

Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan. Jakarta:  
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kemendikbud, 2016.

ix, 57 hal

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. DATA              | 6. PENDIDIKAN NONFORMAL |
| 2. ANAK-ANAK         | 7. PUTUS SEKOLAH        |
| 3. TIDAK SEKOLAH     | 8. PEKERJA ANAK         |
| 4. 7-18 TAHUN        | 9. EKONOMI              |
| 5. PENDIDIKAN FORMAL |                         |
| I. Judul             |                         |
| II. PDSPK            |                         |

Tim Penyusun

Pengarah:  
Siti Sofiah

Penulis:

1. Siti Sofiah
2. Noorman Sambodo

Penyunting:  
Sudarwati

Ilustrator:  
Noorman Sambodo

@ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku “Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi anak yang tidak sekolah yang ada.

Sesuai dengan tujuan maka analisis yang dihasilkan berupa informasi statistik dan analisis mengenai anak-anak tidak sekolah dan mengembangkan profil lengkap anak-anak ini yang mencerminkan beberapa masalah dan kesenjangan yang mereka hadapi berkaitan dengan pendidikan.

Indonesia hampir mencapai tuntas wajib belajar dalam pendidikan dasar. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum tuntas wajib belajar pendidikan dasar dicapai. Sementara capaian di tingkat SMP semakin meningkat, satu dari lima anak tidak masuk ke sekolah menengah pertama. Angka putus ini berlangsung hampir sama pada transisi dari SD ke SMP dan sebelum menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Banyak anak-anak usia 6 tahun yang sudah memasuki jenjang pendidikan dasar bahkan mencapai 70%. Partisipasi sekolah pada jenjang SD mencapai puncaknya pada usia 10 dan 11, pada jenjang SMP pada usia 14 tahun dan pada jenjang SM mencapai puncaknya pada usia 17 tahun. Tingkat partisipasi jenjang SD (usia 7-12 tahun) adalah 99,69% , jenjang SMP usia 13-15 tahun (tidak termasuk anak yang berada dijenjang SD adalah 96,98% dan jenjang SMP usia 13-15 tahun termasuk yang berada di jenjang SD adalah 95,00%. Untuk jenjang SD, usia 12 tahun merupakan usia puncak dalam persentase anak putus sekolah sebesar 0,69% sedangkan untuk jenjang SMP, usia 15 tahun merupakan usia puncak dalam persentase anak putus sekolah sebesar 8,82% karena banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SM. Penyebab anak-anak usia 7-15 tahun putus sekolah atau tidak melanjutkan bervariasi, akan tetapi yang terbesar adalah alasan ekonomi dan bekerja untuk mencari nafkah.

## KATA PENGANTAR

Buku “Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi anak yang tidak sekolah yang ada.

Sumber data dan informasi tentang Anak Tidak Sekolah adalah Statistik Pendidikan Tahun 2014/2015 yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul 2015 yang merupakan survei yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode analisis yang digunakan dalam menyusun analisis anak tidak sekolah adalah analisis deskriptif dengan sajian data dalam bentuk tabel sederhana dan berupa grafik sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami sajian. Unit analisis yang digunakan adalah provinsi sehingga dapat gambaran anak yang tidak sekolah di masing-masing provinsi.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2016

Kepala,

Dr. Ir. Bastari. M.A

NIP 19660730 1990011001

## DAFTAR ISI

Katalog Dalam Terbitan .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Hasil yang Diharapkan.....	10
Bab II Kajian Pustaka.....	11
A. Sektor Pendidikan .....	11
B. Struktur .....	15
C. Pengantar Umum Lima Dimensi Pengecualian .....	19
Bab III Metodologi Dan Pembahasan .....	22
A. Sumber Data.....	22
B. Profil Anak-anak dalam Dimensi 1 .....	22
C. Profil Anak-anak dalam Dimensi 2 dan 3 .....	26
D. Anak tidak sekolah dan keterlibatan dalam pekerja anak .....	39
E. Profil dari Anak yang Beresiko Putus di Dimensi 4 dan 5 .....	52
Bab VI Penutup .....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah sekolah dan siswa, 2014-15.....	17
Tabel 1.2	Jumlah lembaga dan siswa dalam pendidikan nonformal, 2014-15 .....	19
Tabel 3.1	Persentase anak-anak usia dini dalam pendidikan anak usia dini atau SD, berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik lainnya .....	25
Tabel 3.3	Tingkat anak-anak tidak sekolah berdasarkan usia .....	29
Tabel 3.4	Tingkat partisipasi murni, berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, dengan Indeks Kesenjangan Gender .....	30
Tabel 3.5	Jumlah anak putus sekolah, menurut kelompok umur dan jenis kelamin .....	31
Tabel 3.7	Tingkat partisipasi SMP, berdasarkan usia dan jenis kelamin	34
Tabel 3.8	Persentase anak putus sekolah berumur 7-12 tahun berdasarkan usia dan jenis kelamin.....	36
Tabel 3.9	Persentase anak putus sekolah berumur 13-15 tahun berdasarkan usia dan jenis kelamin.....	37
Tabel 3.10	Persentase anak putus sekolah berumur 7-18 tahun yang tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi berdasarkan alasan utama tidak bersekolah .....	38
Tabel 3.11	Pekerja Anak .....	45
Tabel 3.12	Pekerja Anak dan Anak Tidak Sekolah .....	46
Tabel 3.13	Anak tidak sekolah dan pekerja anak .....	47
Tabel 3.14	Anak tidak sekolah: keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dan pekerjaan rumah tangga.....	48

Tabel 3.15	Anak tidak sekolah dalam aktivitas ekonomi berdasarkan sektor pekerjaan .....	50
Tabel 3.16	Kehadiran di sekolah dan pekerja anak .....	51
Tabel 3.17	Angka Mengulang oleh kelas di tingkat SD dan SMP.....	53
Tabel 3.18	Angka putus sekolah menurut tingkat dan jenis kelamin di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama .....	54

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah sekolah Kemendikbud, 2014-15 .....	18
Grafik 1.2	Jumlah sekolah Kemenag, 2014-15 .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase dari anak-anak tidak sekolah berdasarkan usia... 29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, yang diperkirakan 238 juta (menurut sensus 2010). Namun, distribusi populasinya tidak homogen, sementara sekitar 60% dari wilayah daratan Indonesia berupa hutan tropis dan pulau Jawa (dimana lebih dari setengah dari orang hidup) adalah salah satu daerah yang paling padat penduduknya di dunia.

Meskipun jumlah penduduk telah naik tiga kali lipat dalam 60 tahun (dari 77 juta pada tahun 1950), laju pertumbuhan penduduk telah turun setengahnya dalam 30 tahun terakhir (dari 2,2% menjadi 1,1%). Ukuran dari kelompok anak-anak usia sekolah dasar tetap stabil pada sekitar 41 juta sejak akhir 1980-an.

Indonesia terdiri dari lebih dari 13.000 pulau dimana hanya 6.000 yang dihuni. Geografi wilayah Indonesia yang kepulauan serta topografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau mengakibatkan sebagian penduduk Indonesia tinggal di daerah terpencil.

Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami karena terletak di tepi tiga lempeng tektonik utama. Ditambah dengan tingginya frekuensi kejadian seperti angin topan, banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan, membuat Indonesia termasuk diantara negara-negara paling rawan bencana alam di dunia .

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar meskipun ada minoritas yang cukup besar dari agama lain dalam konteks keragaman agama.

Indonesia adalah salah satu masyarakat yang paling beragam etnis dan multibahasa dimana ada lebih dari 700 bahasa meskipun sebagian besar dari mereka (khususnya yang di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang terancam punah (dituturkan oleh kurang dari 100.000 orang). Selain itu, sebagai bagian dari pembangunan bangsa, Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi diajarkan di sekolah dan diucapkan oleh sebagian besar warga negara Indonesia.

Salah satu pencapaian penting dari proses demokratisasi yang dimulai pada tahun 1998 adalah pembentukan otonomi daerah melalui reformasi desentralisasi yang luas untuk mencocokkan aspirasi berbagai kelompok. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dimana lima provinsi yang mempunyai status khusus, memiliki legislatif dan gubernur sendiri. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan dasar.

Indonesia baru mendedikasikan sebagian kecil dari anggaran untuk pendidikan dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand. Namun, kesenjangan telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir dan pemerintah berkomitmen untuk lebih meningkatkan alokasi untuk sektor pendidikan.

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Ada beberapa target yang harus di capai dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat

SD/MI pada 2014 sebesar 91,3% dan diharapkan pada 2019 menjadi 94,8% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 111% menjadi 114,1%. Tingkat SMP/MTs dengan APM yang pada 2014 79,4% menjadi 82% pada 2019 dan APK dari 101,6% menjadi 106,9%. Adapun tingkat SMA/MA/SMK, pada 2014 APM 55,3% dan diharapkan pada tahun 2019 menjadi 67,5% dan APK dari 79,2% menjadi 91,6%.

Target pembangunan di bidang pendidikan lainnya adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah, dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sejalan dengan target pembangunan untuk meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan diperlukan upaya dan kebijakan khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hasil analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan jumlah anak tidak sekolah usia 7-15 tahun telah mengalami penurunan dari 2,52 juta atau 6% dari populasi pada 2009 menjadi 1,99 juta atau 4,6% dari populasi pada 2012. Disparitas Gender pendidikan dasar juga tidak menjadi hal yang mengemuka dan telah mengalami penurunan pada kurun 2009-2012. Disparitas Gender tingkat SD 2,30% vs 1,80% pada 2009 dan 2,25% vs 1,83% pada 2012. Pada tingkat SMP 15,7% vs 13,4% pada 2009 dan 11,44% vs 9,17% pada 2012 (UNICEF dan

Kemendikbud, 2015). Meskipun demikian angka putus sekolah pendidikan SMP dan SMA relatif tinggi. Hal ini terbukti angka putus sekolah usia 7-12 tahun lebih kecil, yaitu 2% dari populasi anak usia 7-12 dibandingkan usia 13-15 tahun yaitu 10,3% dari populasi usia 13-15 pada 2012. Adanya korelasi negatif antara status sosial ekonomi dengan kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa peluang anak dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk tidak melanjutkan sekolah lebih besar. Pendidikan ibu juga sangat menentukan karena berkorelasi positif dengan peluang anak tetap bersekolah. Semakin tinggi pendidikan ibu akan semakin tinggi peluang anak untuk bersekolah (UNICEF dan Kemendikbud, 2015).

Pada tahun 2006 anak usia 7-12 tahun yang mempunyai kepala rumah tangga yang tidak berijazah resiko putus sekolahnya lebih tinggi 11,55 kali anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah keatas. Sedangkan anak yang mempunyai kepala rumah tangga berijazah pendidikan dasar mempunyai resiko putus sekolah lebih tinggi 4,18 kali anak yang berkepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah ke atas. (Sudarwati. 2009. 38)

Berdasarkan Susenas 2006, pada tahun 2006 anak usia 13-15 tahun yang mempunyai kepala rumah tangga yang tidak berijazah resiko putus sekolahnya lebih tinggi 21,19 kali anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah keatas. Sedangkan anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang berijazah pendidikan dasar mempunyai resiko putus sekolah lebih tinggi 8,0 kali anak yang berkepala rumah tangga yang mempunyai ijazah pendidikan menengah ke atas. (Sudarwati. 2009. 40)

Selain masalah ekonomi, persoalan wilayah juga menjadi pendorong terjadinya putus sekolah seperti jauhnya lokasi sekolah. Di wilayah-wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas, seperti wilayah-wilayah pedalaman, untuk mencapai sekolah yang berjarak puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. Jika kondisi transportasi wilayah memang sulit dan memakan biaya besar, bisa dipastikan putus sekolah akan banyak terjadi. Data menunjukkan bahwa sebagian kasus putus sekolah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang secara geografis masih kesulitan sarana transportasi. Beberapa provinsi yang wilayahnya luas seperti yang ada di Indonesia bagian timur dan beberapa di bagian barat masih memiliki kendala transportasi. Misalnya, Maluku dan Papua yang memiliki luas wilayah kabupaten dan kota rata-rata ribuan hingga puluhan ribu kilometer persegi. Meski wilayahnya sangat luas, jumlah sekolah yang ada terbatas. Dampaknya, persebaran pun tidak merata. Berdasarkan hasil survei Susenas tahun 2006 (BPS, 2006) persentase penduduk yang berumur 10-14 yang sudah tidak bersekolah lagi adalah 3,47% di wilayah perkotaan dan 6,82% di wilayah pedesaan. Berdasarkan data dari Kemendikbud, masih ada disparitas angka partisipasi kasar untuk jenjang SMP/MTs antara kabupaten dan kota. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abbas Gozali dkk, ditemukan bahwa putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP lebih banyak terjadi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan (Sudarwati. 2009. 16).

Meskipun angka putus sekolah tingkat SMP dan SMA tinggi, program pendidikan yang tersedia masih berfokus pada anak yang berada di dalam sistem pendidikan dan mengurangi resiko putus sekolah untuk siswa yang bersekolah. Kebijakan terkait anak tidak sekolah masih sangat terbatas. Formulasi dan implementasi kebijakan ini membutuhkan pemahaman

yang komprehensif mengenai karakteristik rumah tangga dari anak putus sekolah dan preferensi pihak terkait dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Pihak terkait dalam hal ini termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pendidikan formal dan non-formal serta lembaga pelatihan dan keterampilan.

Pemerintah pusat saat ini berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Program BSM melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mulai akhir 2014. Melalui Program Indonesia Pintar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak tidak sekolah sebagai penanda agar mereka kembali bersekolah atau mendapat pelatihan dengan mendapat manfaat PIP. Diharapkan dengan menerima KIP sebagai penanda dan manfaat PIP akan memberikan insentif awal bagi anak tidak sekolah baik yang belum bersekolah, putus sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah untuk masuk/kembali ke sekolah atau berpartisipasi dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik formal atau non-formal.

Untuk lebih mendorong anak kembali bersekolah maka manfaat PIP yang berupa bantuan tunai untuk siswa baru diberikan bila anak sudah terdaftar di lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (lembaga kursus dan pelatihan, serta program kesetaraan/Paket A-B-C). Dengan KIP maka diharapkan anak usia 6-21 tahun dapat terus bersekolah, termasuk yang tidak sekolah dapat didorong untuk kembali bersekolah.

Pada tahun 2013, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran Program BSM, mekanisme penetapan sasaran diperbaiki dari sebelumnya

berbasis sekolah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga/keluarga dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Perubahan ini telah meningkatkan ketepatan sasaran pada kelompok miskin dan kurang mampu. Namun demikian masih ada kelemahan KPS untuk Program BSM yaitu KPS tidak mencantumkan semua nama anak dalam rumah tangga/keluarga. Penerima KPS dan pihak sekolah tidak mengetahui apakah mereka berhak mendapatkan manfaat BSM. Melalui pemberian KIP diharapkan dapat memperbaiki kelemahan tersebut.

Cakupan/kuota nasional Program Indonesia Pintar 2015 mengalami peningkatan dari Program BSM 2014, yaitu dari 11,1 juta anak menjadi 20,3 juta anak. Sebagian dari alokasi kuota nasional tersebut didedikasikan kepada anak tidak sekolah. Selain kepada siswa lembaga pendidikan formal, secara bertahap bantuan program tersebut akan disalurkan untuk siswa di lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B dan C serta lembaga pendidikan non-formal lainnya.

Walaupun telah ada perhatian dari pemerintah pusat terkait isu anak tidak sekolah, masih belum ada strategi dan mekanisme pelaksanaan yang spesifik untuk menangani isu anak tidak sekolah tersebut. Beberapa pertanyaan masih harus dijawab, antara lain bagaimana Program Indonesia Pintar dapat membantu mengurangi angka putus sekolah? Apakah manfaat dari PIP cukup memberikan insentif bagi anak-anak tidak sekolah (terutama pekerja anak) untuk kembali bersekolah? Apakah sekolah formal atau lembaga pendidikan non-formal memiliki sumber daya yang cukup untuk menerima anak yang putus/tidak sekolah, dan masih banyak pertanyaan serta tantangan yang perlu diperhatikan untuk menangani isu anak tidak sekolah ini. Masih belum adanya strategi dan

mekanisme pelaksanaan terkait penjangkauan anak tidak sekolah ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang fenomena anak-anak di luar sekolah dan belum cukupnya *supply side* (fasilitas pendidikan dan kelembagaan bagi anak-anak tidak sekolah).

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan beberapa alternatif untuk memastikan ketersediaan akses pendidikan yang berkontribusi dalam upaya mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah. Contohnya melalui pengembangan Program Sekolah Satu Atap SATAP tahun 2005 di daerah miskin dan terpencil, SMP Terbuka serta Program Kesetaraan.

SATAP adalah SMP dengan tiga ruang kelas yang dibangun di tempat yang sama dengan sebuah SD. Apabila tidak tersedia dana untuk membangun ruang kelas baru, maka sekolah satu atap memakai gedung SD pada siang hari. Banyak sekolah satu atap juga mengaryakan guru-guru SD untuk mengajar siswa-siswa SMP. SD dan SMP tersebut dapat dikelola oleh satu manajemen, atau oleh dua manajemen yang berbeda.

SMP Terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) merupakan lembaga pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu (baik usia sekolah maupun di luar usia sekolah) yang tidak bisa mengikuti atau melanjutkan ke pendidikan formal. Tujuan mengikuti pendidikan kesetaraan adalah untuk mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan formal dan untuk berintegrasi kembali ke pendidikan formal.

Menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah di tingkat daerah memerlukan keterlibatan beberapa instansi terkait, antara lain sekolah dan madrasah, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tingkat

kabupaten/kota, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi, unsur pemerintah daerah serta unsur masyarakat.

## **B. Permasalahan**

Keberadaan anak tidak sekolah sulit diketahui, terutama bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun dan telah lama tidak sekolah. Kadang mereka tidak tinggal lagi di rumah orangtuanya. Menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah menjadi tidak mudah. Oleh karena itu inovasi dalam menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah pantas dikembangkan dan ditularkan untuk memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak di wilayahnya untuk mempertajam dampak penanggulangan kemiskinan.

Proses menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah, dalam prakteknya tidak mudah. Meskipun demikian seiring dengan dilaksanakannya Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan menjangkau anak tidak sekolah, maka penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah perlu terus diupayakan, walaupun secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan inovasi mekanisme penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah yang dapat membantu agar anak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya.

### **C. Tujuan Penulisan**

Secara umum, analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi anak yang tidak sekolah yang ada. Secara khusus, analisis ini bertujuan untuk meningkatkan informasi statistik dan analisis mengenai anak-anak tidak sekolah dan mengembangkan profil lengkap anak-anak ini yang mencerminkan beberapa masalah dan kesenjangan yang mereka hadapi berkaitan dengan pendidikan.

### **D. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya sebuah dokumen Analisis Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun yang memiliki fungsi optimal pendayagunaan data untuk kebijakan yang mampu membantu Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab Sistem Pendidikan Nasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Sektor Pendidikan**

##### **A.1 Kebijakan**

Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Serangkaian perubahan di masa reformasi sejak tahun 1998 telah lebih lanjut menekankan komitmen ini:

- Sebagai bagian dari perubahan kedua pada tahun 2000, Bab XA memperkenalkan jaminan pada penghormatan hak asasi manusia dan termasuk pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia (Pasal 28 C ayat 1).
- Sebagai bagian dari amandemen keempat tahun 2002, Bab XIII fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 menguraikan tentang kewajiban pemerintah untuk melayani hak belajar dari semua warga negara dan mengembangkan sistem pendidikan:
  - Menurut ayat 2, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mendanai ini".
  - Menurut ayat 3, "pemerintah mengatur dan menerapkan sistem pendidikan nasional, yang akan diatur oleh hukum".

- Menurut ayat 4, "negara harus memberikan prioritas kepada anggaran pendidikan dengan mengalokasikan sedikitnya dua puluh persen dari negara serta dari anggaran daerah".

Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Serangkaian perubahan di masa reformasi sejak tahun 1998 telah lebih lanjut menekankan komitmen ini :

- Sebagai bagian dari perubahan kedua pada tahun 2000, Bab XA memperkenalkan jaminan pada penghormatan hak asasi manusia dan termasuk pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia (Pasal 28 C ayat 1).

- Sebagai bagian dari amandemen keempat tahun 2002, Bab XIII fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 menguraikan tentang kewajiban pemerintah untuk melayani hak belajar dari semua warga negara dan mengembangkan sistem pendidikan:

- Menurut ayat 2, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mendanai ini".

- Menurut ayat 3, "pemerintah mengatur dan menerapkan sistem pendidikan nasional, yang akan diatur oleh hukum".

- Menurut ayat 4, "negara harus memberikan prioritas kepada anggaran pendidikan dengan mengalokasikan sedikitnya dua puluh persen dari negara serta dari anggaran daerah".

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar, Parlemen menyetujui UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memberikan dasar-dasar

pendidikan filsafat dan prinsip-prinsip untuk sistem, termasuk desentralisasi, otonomi satuan pendidikan, pendidikan yang demokratis dan nondiskriminatif, peran negara, keadilan dan hak asasi manusia. Hukum memperkenalkan persyaratan bahwa sistem harus memenuhi minimal standar nasional pendidikan yang berkualitas. Akhirnya, hukum juga memperkenalkan tiga pendekatan untuk pendidikan untuk semua yaitu pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus.

Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang pendidikan agama (serta pendidikan dalam agama) mengenalinya sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 47/2008 tentang Wajib Belajar menentukan minimal program pendidikan adalah semua warga negara Indonesia harus mengikuti tanpa memandang agama, suku atau status sosial ekonomi. Peraturan tersebut mencakup kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan akses pendidikan, jika mungkin gratis. Peraturan tersebut memperkuat semua skema bantuan keuangan yang telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.

Peraturan Pemerintah No. 48/2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur tanggung jawab gabungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal sumber pendanaan, pengelolaan dana dan alokasi dana dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Selain peraturan di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan beberapa peraturan menteri, yang

merupakan bagian integral dari upaya untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kerangka kebijakan pendidikan saat ini dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (RENSTRA) Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan.

## **A.2 Lembaga**

Tanggung jawab untuk pengantar masyarakat pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Indonesia (kebijakan, perencanaan dan pembiayaan, kurikulum, infrastruktur dan fasilitas, dan tenaga kependidikan) dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, dengan peran penting berada di tangan kedua. Lembaga-lembaga kunci dalam pemberian layanan pendidikan tertuang dalam UU No. 20/2003.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pengaturan standar, akreditasi, sertifikasi, evaluasi, pengembangan program, pemantauan dan regulasi pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan standar nasional sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan melakukan pengawasan umum terhadap pendidikan sekolah. Meskipun tidak lagi menyediakan anggaran rutin untuk sekolah umum, namun masih mengelola anggaran pembangunan untuk mendukung sejumlah kegiatan, karena masih banyak

pihak yang sama sekali tidak membantu investasi termasuk diantaranya buku pelajaran, guru kontrak, hibah biaya operasional sekolah, membangun kembali sekolah kerusakan dan ruang kelas, dan program peningkatan kualitas lainnya.

- Provinsi bertanggung jawab untuk perencanaan dan jaminan kualitas, namun peran provinsi masih relatif sederhana dalam penyediaan layanan pendidikan.
- Kementerian Agama (Kemenag) bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, pengembangan program dan inisiasi legislasi untuk pendidikan madrasah di semua tingkatan. Pengelolaan pemberian layanan pendidikan masih terpusat dibandingkan dengan sistem Kemendikbud dan juga penting untuk diingat bahwa sebagian besar lembaga pendidikan agama berstatus swasta.
  - Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab atas tiga jenis lembaga-lembaga Islam, seperti madrasah (setara SD, SMP dan SMA) yang merupakan tanggung jawab Direktorat Pendidikan Madrasah, Pesantren dan asrama madrasah yang menawarkan program pendidikan formal dan nonformal dan madrasah diniyah yang beroperasi di luar sistem pendidikan nasional.

## **B. Struktur**

Tahun ajaran dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni. Gambar 1.2 menunjukkan struktur sistem. Penting untuk dicatat bahwa

meskipun usia awal untuk pendidikan dasar adalah tujuh tahun, dalam prakteknya banyak orang tua memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah dasar pada usia kurang dari 7 tahun. Hal Ini memiliki dampak pada usia awal untuk memulai pendidikan pra sekolah dasar dan sekolah menengah.

Usia	Pendidikan sekolah				Pendidikan Diluar Sekolah	
					Nonformal	Informal
23-	Pendidikan Tinggi / Pasca Sarjana Pendidikan Tinggi Islam					
19-22	Pendidikan Tinggi / Sarjana Pendidikan Tinggi Islam / Diploma					
16-18	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Madrasah Aliyah (MA)	Madrasah Aliyah Kejuruan (MA)	Paket C	Kursus / Pendidikan Keluarga
13-15	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Madrasah Tsanawiyah (MTs)		Paket B	
7-12	Sekolah Dasar (SD)		Madrasah Ibtidaiyah		Paket A	
4-6	Taman Kanak-kanak (TK)		Raudhatul Athfal		Kelompok Bermain	
0-3					Tempat Penitipan Anak	

Berikut jenis sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan tingkatan yang berbeda.

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu komponen dari layanan pengembangan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini secara dominan ditawarkan oleh organisasi nonpemerintah, tetapi pemerintah semakin mengambil tanggung jawab untuk mengatur sektor ini dan memberikan jaminan kualitas, terutama melalui Keputusan Menteri No. 58/2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Ada dua jenis sekolah

pradasar formal, yaitu TK dan Raudhatul Athfal (RA) yang merupakan TK Islam.

Tabel 1.1 memberikan gambaran rangkuman dari jumlah sekolah dan siswa dengan sektor dan tingkat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah sekolah dan siswa, 2014-15**

	Kemendikbud			Kemenag			Jumlah
	Negeri	Swasta	Subjumlah	Negeri	Swasta	Subjumlah	
Jumlah Sekolah							
TK	2.764	76.604	79.368	-	27.875	27.875	107.243
SD	132.609	14.904	147.513	1.686	22.667	24.353	171.866
SMP	22.209	14.309	36.518	1.437	15.304	16.741	53.259
SMA	6.232	6.281	12.513	759	6.823	7.582	20.095
SMK	3.250	9.171	12.421	-	-	-	12.421
SLB	532	1.491	2.023	-	-	-	2.023
Jumlah Siswa							
TK	281.653	4.076.572	4.358.225	-	1.180.243	1.180.243	5.538.468
SD	23.138.933	2.993.208	26.132.141	454.725	3.008.303	3.463.028	29.595.169
SMP	7.402.381	2.528.266	9.930.647	731.266	2.427.423	3.158.689	13.089.336
SMA	3.140.513	1.092.059	4.232.572	384.630	823.986	1.208.616	5.441.188
SMK	1.748.338	2.462.907	4.211.245	-	-	-	4.211.245
SLB	42.440	67.154	109.594	-	-	-	109.594

Sumber: Kemendikbud dan Kemenag (2015)

Pendidikan dasar sembilan tahun telah wajib sejak tahun 1994 dan penyediaan layanan publik dan gratis yang telah diabadikan menjadi 2002 amandemen UUD dan menjadi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini terdiri dari dua tahap:

- Sekolah Dasar (SD), kelas 1-6:
  - Sekolah Dasar di bawah yurisdiksi Kemendikbud, yang sebagian besar adalah masyarakat

- Madrasah Ibtidaiyah di bawah yurisdiksi Kemenag, yang sebagian besar adalah swasta

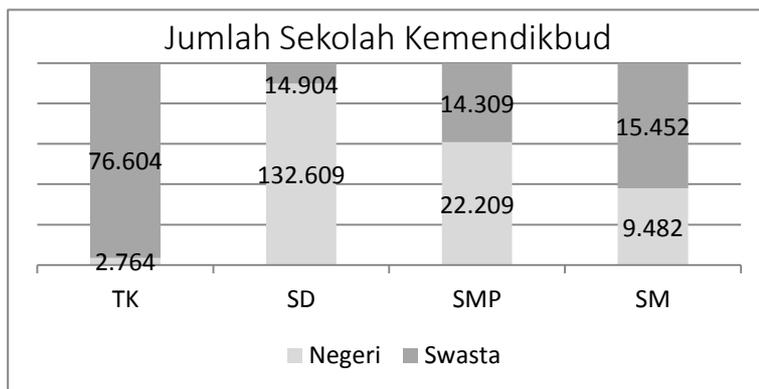
Pemeriksaan evaluasi belajar akhir nasional pada akhir siklus sekolah dasar, umumnya dikenal sebagai Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional), dihapuskan pada tahun 2002 dan digantikan oleh Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

- Sekolah Menengah Pertama (SMP), kelas 7-9:
  - SMP di bawah yurisdiksi Kemendikbud
  - Madrasah Tsanawiyah dibawah yurisdiksi Kemenag

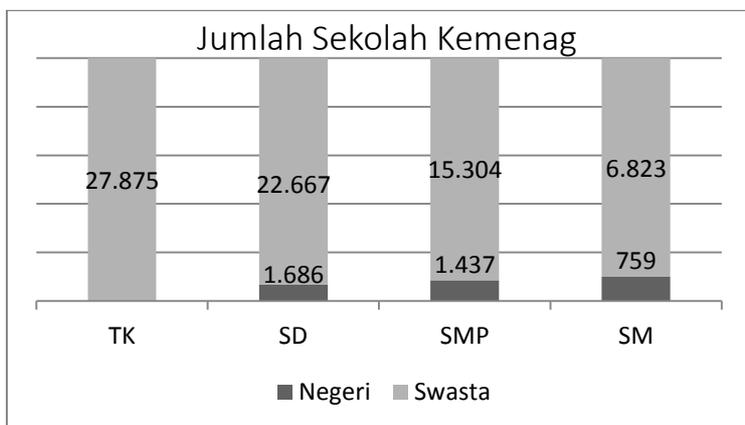
Setiap siswa, termasuk di madrasah, harus mengikuti Ujian Akhir Nasional pada akhir tingkat 9 di empat mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, dan Matematika.

- Sekolah Menengah (SM), kelas 10-12:

Sekolah tersebut tersedia sekolah-sekolah sekuler dan kejuruan umum, serta madrasah (Aliyah). Setiap sekolah harus melalui proses akreditasi dikoordinasikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah serta diklasifikasikan sesuai dalam empat kelompok A (sangat baik), B (baik) atau C (cukup), dan tidak terakreditasi.



Grafik 1.1  
Jumlah sekolah Kemendikbud, 2014-15



Grafik 1.2  
Jumlah sekolah Kemenag, 2014-15

Pada akhirnya, kesetaraan atau paket pendidikan nonformal yang disebut Paket A, B, dan C disediakan untuk menyetarakan pendidikan SD, SMP dan pendidikan menengah. Untuk di tahun 2014-2015, tidak terdapat data untuk paket A.

Tabel 1.2 Jumlah lembaga dan siswa dalam pendidikan nonformal, 2014-15

	Siswa Terdaftar	Lulusan	Lembaga
Paket A	-	-	-
Paket B	201.972	140.361	5.904
Paket C	346.811	112.787	9.307

Sumber: Kemendikbud (2015)

### C. Pengantar Umum Lima Dimensi Pengecualian

Kerangka konseptual dan metodologi Anak Tidak Sekolah memperkenalkan model baru untuk menganalisis masalah anak tidak sekolah melalui 'Lima Dimensi Pengecualian'. Model ini menyajikan lima

kelompok sasaran untuk menjangkau anak-anak di (i) tiga tingkat pendidikan: PAUD, SD dan SMP (Dimensi 1-3) dan (ii) dua kelompok populasi yang berbeda, yaitu anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang berada di sekolah tetapi berisiko putus (dimensi 4-5). Istilah 'pengecualian' memiliki makna yang sedikit berbeda tergantung pada populasi yang bersangkutan, misalnya anak-anak yang berada di luar sekolah dikecualikan dari pendidikan, sementara anak-anak yang berisiko putus sekolah dapat dikecualikan dalam pendidikan. Lima Dimensi Pengecualian adalah:

1. Anak-anak usia sekolah usia dini (6 tahun) yang tidak bersekolah pra-SD
2. Anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang tidak berada di sekolah dasar atau menengah
3. Anak-anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) yang tidak di sekolah dasar atau menengah
4. Anak-anak yang berada di sekolah dasar, tetapi berisiko putus
5. Anak-anak yang berada di sekolah menengah tetapi berisiko putus

Mengenai Dimensi 2 dan 3, anak-anak usia sekolah dasar biasanya fokus dari upaya untuk mencapai dunia pendidikan dasar. Namun, hal ini juga penting untuk melihat diluar kelompok ini karena ada juga besar populasi anak tidak sekolah di kalangan anak-anak usia menengah. Secara umum, anak-anak usia sekolah dasar atau lebih rendah dianggap di sekolah jika mereka berpartisipasi dalam pendidikan dasar atau menengah. Untuk tujuan laporan ini, anak-anak usia sekolah dasar atau lebih yang berada di pendidikan anak usia dini dianggap keluar dari sekolah karena sifat pendidikan pendidikan PAUD dan kualifikasi staf

pengajar di program tersebut tidak memenuhi kriteria yang diterapkan untuk pendidikan dasar.

Dimensi 2 dan 3 dibagi menjadi tiga kelompok:

- Anak-anak yang mengikuti pendidikan dimasa lalu dan putus sekolah
- Anak-anak yang tidak pernah bersekolah, dan
- Anak-anak yang akan mengikuti sekolah dimasa yang akan datang

### **BAB III**

#### **METODOLOGI DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan Analisis Anak Tidak Sekolah ini adalah data anak yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) kor 2015 yang merupakan survei yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Susenas Modul September tahun 2015 ini merupakan survei Susenas Modul periode pertama dari 2 rangkaian pencacahan yang diadakan pada tahun 2015 ini. Total jumlah rumah tangga sampel Susenas 2015 adalah 300.000 rumah tangga untuk estimasi kabupaten/kota dan data dari Statistik Pendidikan tahun 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

##### **B. Kelompok penduduk dalam analisis data SUSENAS**

Tabel dalam bab ini yang mengandalkan data SUSENAS sebagian besar memecah perkiraan oleh berbagai kelompok populasi. Hal ini penting untuk memperhitungkan ukuran relatif masing-masing kelompok.

Pertama, penduduk Indonesia relatif pedesaan yaitu 57% dari orang-orang dalam sampel 2015 tinggal di daerah pedesaan. Kedua, SUSENAS mengklasifikasikan rumah tangga menurut status kekayaan mereka, yang didefinisikan atas dasar pengeluaran konsumsi. Rumah tangga ini telah membandingkan tingkat pengeluaran per kapita dan diklasifikasikan dalam lima kelompok dengan ukuran yang sama (kuintil). Perhatikan bahwa ada lebih banyak anak yang berada di kuintil bawah karena rumah

tangga miskin cenderung memiliki lebih banyak anak-anak didalamnya. Ada perbedaan yang terlihat dalam distribusi rumah tangga menurut kekayaan, yakni rumah tangga yang akan didefinisikan sebagai miskin ditemukan terutama di daerah pedesaan.

Pembagian penduduk oleh daerah dan kekayaan kuintil (%)	Kuintil					Total
	Atas	Menengah ke atas	Menengah	Menengah ke bawah	Bawah	
Perkotaan	31,04	13,64	17,66	22,43	15,23	100,00
Pedesaan	11,69	24,79	21,76	18,17	23,59	100,00
Perkotaan	66,68	29,30	37,94	48,19	32,73	42,97
Pedesaan	33,32	70,70	62,06	51,81	67,27	57,03
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perhitungan berdasarkan Susenas Kor 2015

Ketiga, jika negara ini dibagi menjadi lima wilayah yang lebih luas (yaitu empat pulau besar dan pulau-pulau yang tersisa dari Indonesia timur) jelas bahwa ada konsentrasi penduduk miskin di Indonesia timur dan di Jawa.

Pembagian penduduk oleh daerah dan kekayaan kuintil (%)	Kuintil					Total
	Atas	Menengah ke atas	Menengah	Menengah ke bawah	Bawah	
Sumatera	18,08	13,70	23,35	23,11	21,76	100,00
Jawa	27,41	15,31	18,24	21,40	17,63	100,00
Kalimantan	18,85	20,73	20,13	20,15	20,15	100,00
Sulawesi	25,90	13,90	20,02	23,82	16,35	100,00
Indonesia Timur	18,84	24,61	18,01	18,07	20,47	100,00
Sumatera	3,13	2,61	4,23	4,05	3,95	3,59
Jawa	4,32	4,25	3,78	3,83	3,84	4,00
Kalimantan	2,21	2,90	2,52	2,43	2,61	2,53
Sulawesi	2,62	2,19	2,32	2,51	2,15	2,36
Indonesia Timur	1,61	2,03	1,47	1,45	1,71	1,65
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perhitungan berdasarkan Susenas Kor 2015

Akhirnya, tabel berikut membandingkan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah dalam hal distribusi pendidikan kepala rumah tangga bagi anak-anak. Sebuah kelompok efek terlihat karena ada anak-anak yang lebih sedikit di antara anak usia 7-12 tahun yang kepala rumah tangganya tidak memiliki pendidikan dibandingkan dengan usia 13-15 tahun.

Pembagian Penduduk (%)	Pendidikan Ibu				Total
	Tidak sama sekali	Lulus SD (sekolah atau madrasah)	Lulus SMP (sekolah atau madrasah)	Lulus SM (SMA, SMK atau madrasah) atau tersier	
Anak usia 7-12 tahun	1,42	95,90	2,68	0,00	100,00
Anak usia 13-15 tahun	0,92	10,47	78,63	9,98	100,00

Sumber: Perhitungan berdasarkan Susenas MSBP 2015

### C. Profil Anak-anak dalam Dimensi 1

Seorang anak dianggap di sekolah PAUD hanya jika menghadiri TK dan jika tidak menghadiri jenis lain dari program pengembangan anak usia dini.

Tabel 3.1 Persentase anak-anak usia dini dalam pendidikan anak usia dini atau SD, berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik lainnya

	Laki-laki					Perempuan					Total				
	(1) Tidak masuk sekolah	(2A) Masuk Sekolah Dasar	(2B) Masuk Madrasah Ibtidaiyah	(2) Masuk Sekolah Dasar Luar Biasa		(1) Tidak masuk sekolah	(2A) Masuk Sekolah Dasar	(2B) Masuk Madrasah Ibtidaiyah	(2) Masuk Sekolah Dasar Luar Biasa		(1) Tidak masuk sekolah	(2A) Masuk Sekolah Dasar	(2B) Masuk Madrasah Ibtidaiyah	(2) Masuk Sekolah Dasar Luar Biasa	
<b>5 tahun</b>															
<b>Wilayah</b>															
Pedesaan	90,1	9,7	0,2			90,0	9,4	0,6			90,1	9,6	0,4		
Perkotaan	91,1	8,6	0,4			86,7	12,8	0,5			89,0	10,6	0,4		
<b>6 tahun</b>															
<b>Wilayah</b>															
Pedesaan	57,1	53,7	43,8	50,0		21,7	72,7	5,3	0,2		23,3	72,2	4,4	0,2	
Perkotaan	29,3	67,1	3,3	0,3		25,9	70,0	3,8	0,2		27,6	68,5	3,6	0,3	

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Data dari Susenas menunjukkan bahwa kurang dari 10% dari anak usia 5 tahun dan hanya kurang dari 70% dari anak usia 6 tahun mengikuti pendidikan sekolah dasar. Angka-angka ini menunjukkan bahwa usia awal untuk sekolah dasar adalah 6 tahun karena sebagian besar anak-anak yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini berada pada usia 5 tahun dan hampir 10% dari anak usia 5 tahun dan 80% dari 6 tahun menghadiri pendidikan dasar formal. Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, usia awal pendidikan PAUD dan SD tidak diterapkan secara ketat.

Tabel 3.1 berfokus pada anak usia 5 tahun, sedangkan panel yang lebih rendah, yang menyediakan informasi lebih lanjut, berfokus pada anak usia 6 tahun. Kesimpulan dari tabel 3.1 adalah:

- Perbedaan utama dalam hal kehadiran pendidikan anak usia 5 dan 6 tahun adalah antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama pada anak usia 6 tahun, terdapat titik perbedaan sebesar 14% untuk laki-laki (67,1% di daerah perkotaan dibandingkan 53,7% di daerah pedesaan), untuk perempuan lebih banyak di daerah pedesaan dibanding di daerah perkotaan sebesar 72,7% dibanding 70,0%.
- Ada perbedaan yang sangat besar dalam probabilitas bahwa seorang anak di sekolah tergantung pada tingkat pendidikan ibu. Seorang anak lebih mungkin untuk keluar dari sekolah jika ibunya tidak menerima pendidikan dibandingkan jika ibu tersebut menjadi mahasiswa di universitas.

Terdapat pola yang kuat dalam pendaftaran awal pendidikan dasar dikaitkan dengan seorang anak yang tinggal di daerah perkotaan, memiliki seorang ibu yang berpendidikan.

#### **D. Profil Anak-anak dalam Dimensi 2 dan 3**

Untuk memahami struktur populasi dari anak-anak sekolah yang berusia 6-18 tahun, Tabel 3.2 menyajikan rincian partisipasi berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Perhatian tertuju pada pengamatan awal sebagai berikut ini:

- Partisipasi sekolah pada jenjang SD mencapai puncaknya pada usia 10 dan 11 tahun yang mencapai nilai tertinggi 99%.

- Pada jenjang SMP mencapai puncak pada usia 14 tahun pada nilai 90% dan pada jenjang SM mencapai puncak pada usia 17 tahun sebesar 24,21%.
- Terdapat anak-anak berpendidikan di luar batas usia untuk masing-masing jenjang pendidikan, tetapi pada kasus ini persentasenya tidak terlalu tinggi pada jenjang SMP dan SMA.

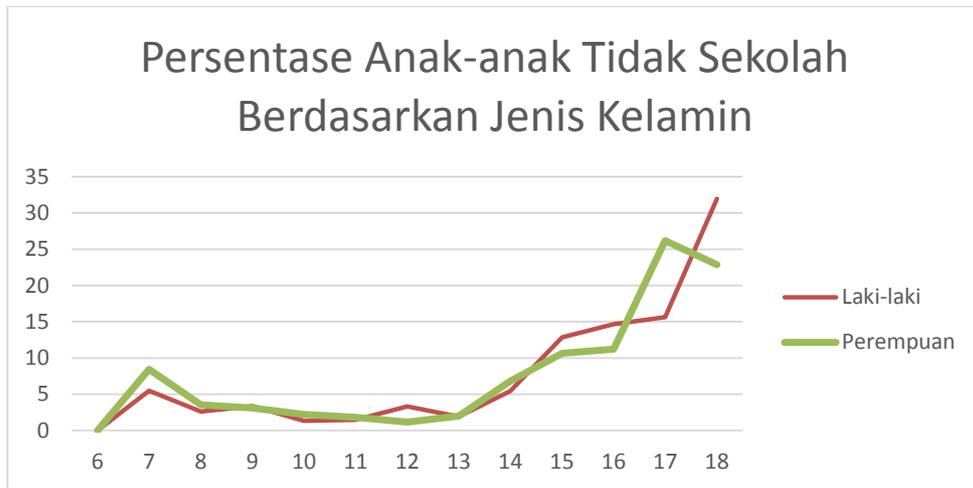
Tabel ini merupakan dasar untuk analisis banyak hal makna yang terkandung didalamnya. Namun, untuk memahami implikasi yang lebih jelas, hal ini berguna untuk menyajikan temuan dalam cara-cara alternatif lainnya.

Tabel 3.2 Persentase anak bersekolah, berdasarkan usia dan tingkat pendidikan

Usia	PAUD	SD	SMP	SM	Tersier
<b>Laki-laki</b>					
6	27,38	72,62			
7	3,48	96,52			
8	1,48	98,49			
9	1,15	98,85			
10	0,85	99,15			
11	0,95	99,05			
12	1,21	83,67	15,12		
13	0,92	17,56	81,52		
14	1,12	10,57	88,32		
15	1,10	9,43	65,41	10,46	
16	1,48	9,15	21,78	24,92	
17	1,61	7,55	13,81	27,30	
18	1,41	12,00	15,19	23,02	8,09

Perempuan					
6	24,33	75,67			
7	3,32	96,68			
8	1,45	98,55			
9	1,67	98,33			
10	0,85	99,15			
11	0,68	99,28			
12	0,26	82,49	17,26		
13	0,61	12,15	87,24		
14	1,28	6,07	92,65		
15	0,59	6,52	59,69	12,89	
16	0,91	4,59	17,36	20,08	
17	1,18	7,14	11,36	20,66	
18	0,98	5,56	8,73	17,34	15,69
Total					
6	25,93	74,07			
7	3,40	96,60			
8	1,46	98,52			
9	1,40	98,60			
10	0,85	99,15			
11	0,82	99,16			
12	0,75	83,10	16,15		
13	0,77	15,00	84,23		
14	1,19	8,40	90,41		
15	0,86	8,07	62,74	11,59	
16	1,21	6,95	19,64	22,58	
17	1,41	7,36	12,67	24,21	
18	1,21	9,03	12,21	20,40	11,59

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015



Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

**Gambar 3.1**  
Persentase dari anak-anak tidak sekolah berdasarkan usia

**Tabel 3.3** Tingkat anak-anak tidak sekolah berdasarkan usia

Usia	Laki-laki	Perempuan
6	0	0
7	5,48	8,45
8	2,63	3,55
9	3,35	3,10
10	1,33	2,21
11	1,45	1,83
12	3,33	1,16
13	1,90	1,98
14	5,46	6,79
15	12,84	10,65
16	14,64	11,24
17	15,64	26,16
18	31,95	22,88

Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa ada lebih sedikit anak laki-laki dibandingkan anak perempuan yang berada di luar sekolah pada anak usia 7-12 tahun. Perbedaannya adalah sekitar 3 persen diantara anak usia 7 tahun. Rata-rata di kalangan anak-anak berusia 7-18 tahun (kelompok sasaran untuk pendidikan) persentase laki-laki yang berada di luar sekolah melebihi dari anak perempuan. Tetapi menginjak usia 17 tahun, perempuan cenderung lebih banyak yang putus sekolah dibandingkan dengan laki-laki. Puncaknya pada usia 18 tahun laki-laki sangat banyak dibandingkan dengan laki-laki usia sebelumnya. Hal ini menandakan kelompok usia 7-18 terbanyak laki-laki pada usia 18 tahun dan perempuan terbanyak pada usia 17 tahun yang putus sekolah.

Tabel 3.4 Tingkat partisipasi murni, berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, dengan Indeks Kesetaraan Gender

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Indeks Kesetaraan Gender
SD (7-12 tahun)	99,53	99,86	99,69	0,01
SMP (13-15 tahun) (tidak termasuk anak yang berada di jenjang SD)	96,60	97,39	96,98	0,01
SMP (13-15 tahun) (termasuk anak yang berada di jenjang SD)	94,20	95,91	95,00	0,01

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Tabel 3.4 memberikan informasi sebagai berikut:

- Tingkat partisipasi SD adalah jumlah anak yang mengikuti pendidikan dasar dengan dengan usia 7-12. Persentase tingkat partisipasi SD adalah 99,69% dimana persentase untuk anak laki-laki 99,53% dan persentase untuk anak perempuan 99,86%.

Persentase indeks kesetaraan gender sebesar 0,01% sehingga terdapat perbedaan kecil kesetaraan dalam tingkat partisipasi SD.

- Tingkat partisipasi SMP adalah jumlah anak yang mengikuti pendidikan SMP dengan usia 13-15 tahun (tidak termasuk anak yang berada di jenjang SD). Persentase tingkat partisipasi SMP adalah 96,98% di mana untuk persentase untuk anak laki-laki 96,60% dan persentase untuk anak perempuan 97,39%. Persentase indeks kesetaraan gender sebesar 0,01% sehingga terdapat perbedaan kesetaraan yang kecil dalam tingkat partisipasi SMP.
- Begitu pula tingkat partisipasi SMP yang termasuk anak yang berada di jenjang SD. Persentase tingkat partisipasi SMP adalah 95,00% di mana untuk persentase untuk anak laki-laki 94,20% dan persentase untuk anak perempuan 95,91%. Persentase indeks kesetaraan gender sebesar 0,01% sehingga terdapat perbedaan kecil kesetaraan dalam tingkat partisipasi SMP yang termasuk anak yang mengikuti tingkat SD.

Tabel 3.5 Jumlah anak putus sekolah, menurut kelompok umur dan jenis kelamin

	Proyeksi Populasi					
	SUSENAS			BPS/Kemendikbud		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
7-12 tahun <b>Dimensi 2</b>	2.282	1.629	3.911	97.365	79.544	176.909
13-15 tahun <b>Dimensi 3</b>	2.624	1.559	4.183	51.089	33.911	85.000
7-15 tahun <b>Total</b>	4.906	3.188	8.094	148.454	113.455	261.909

Tabel 3.6 Tingkat partisipasi SD, berdasarkan usia dan jenis kelamin

Usia	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak
7	96,54	2.793	96,72	2.624	96,63	5.417
8	98,47	2.970	98,57	2.694	98,52	5.664
9	98,17	2.950	98,36	2.635	98,26	5.585
10	99,13	2.961	99,13	2.841	99,13	5.802
11	98,91	2.993	99,19	2.697	99,04	5.690
12	97,81	2.907	99,39	2.778	98,58	5.685

Provinsi	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak
DKI Jakarta	98,64	218	100,00	202	99,29	420
Jawa Barat	99,57	1.152	99,62	1.052	99,59	2.204
Banten	99,74	386	100,00	344	99,86	730
Jawa Tengah	99,67	1.200	99,40	1.161	99,54	2.361
DI Yogyakarta	99,24	131	100,00	128	99,62	259
Jawa Timur	99,09	1.305	99,75	1.182	99,40	2.487
Aceh	99,87	740	99,69	637	99,78	1.377
Sumatera Utara	99,25	1.316	99,34	1.206	99,29	2.522
Sumatera Barat	99,40	660	99,37	627	99,38	1.287
R I A U	99,17	478	98,95	470	99,06	948
Kep, Riau	100,00	184	99,44	177	99,72	361
J A M B I	99,46	368	99,68	315	99,56	683
Sumatera Selatan	100,00	582	99,27	543	99,65	1.125
Bangka Belitung	99,51	203	98,92	183	99,23	386
Bengkulu	99,61	255	99,63	270	99,62	525
Lampung	100,00	504	99,80	496	99,90	1.000

Kalimantan Barat	98,50	525	98,27	455	98,39	980
Kalimantan Tengah	99,53	423	99,48	385	99,51	808
Kalimantan Selatan	99,20	370	100,00	383	99,60	753
Kalimantan Timur	98,71	305	99,64	273	99,14	578
Kalimantan Utara	99,32	145	99,17	119	99,25	264
<hr/>						
Sulawesi Utara	98,91	363	99,73	375	99,33	738
Gorontalo	98,03	199	99,47	186	98,72	385
Sulawesi Tengah	97,60	447	98,21	439	97,90	886
Sulawesi Selatan	99,45	906	98,93	829	99,20	1.735
Sulawesi Barat	97,57	241	98,65	219	98,08	460
Sulawesi Tenggara	99,79	484	99,12	451	99,47	935
<hr/>						
M A L U K U	98,70	454	99,36	463	99,03	917
Maluku Utara	99,69	320	99,11	334	99,39	654
B A L I	100,00	282	99,24	261	99,63	543
Nusa Tenggara Barat	99,74	380	99,69	322	99,72	702
Nusa Tenggara Timur	97,67	1.046	98,73	933	98,16	1.979
Papua	78,30	671	82,81	583	80,33	1.254
Papua Barat	97,64	331	95,34	266	96,60	597

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Tabel 3.6 memberikan informasi ke dalam kelompok yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi berdasarkan pendidikan sekolah dasar.

- Berdasarkan usia 7-12 tahun tingkat partisipasi SD, untuk usia 7 tahun lebih kecil dibanding usia lain dikarenakan kemungkinan usia masuk sekolah anak SD adalah 6 tahun sehingga mempengaruhi besarnya angka partisipasi 7 tahun dalam sekolah SD.

- Berdasarkan kesenjangan antar provinsi di Indonesia, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah merupakan tiga provinsi yang memiliki tingkat partisipasi yang terendah dengan persentase sebesar 80,33%; 96,60%; dan 97,90. Hampir seluruh anak di Provinsi Indonesia menghadiri pendidikan SD.

Tabel 3.7 Tingkat partisipasi SMP, berdasarkan usia dan jenis kelamin

Usia	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak
13	98,64	2.755	99,01	2.497	98,81	5.252
14	95,04	2.643	96,20	2.507	95,60	5.150
15	88,60	2.689	92,29	2.513	90,34	5.202

Provinsi	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak	Tingkat partisipasi	Jumlah Anak
DKI Jakarta	96,00	96	99,01	100	97,51	196
Jawa Barat	93,30	571	95,43	522	94,31	1.093
Banten	94,48	171	96,15	150	95,25	321
Jawa Tengah	94,32	598	97,33	547	95,74	1.145
DI Yogyakarta	100,00	56	98,51	66	99,19	122
Jawa Timur	97,84	635	95,99	574	96,95	1.209
Aceh	98,64	363	98,43	314	98,54	677
Sumatera Utara	96,51	608	97,25	601	96,88	1.209
Sumatera Barat	93,23	303	98,92	274	95,85	577
R I A U	94,94	225	93,67	207	94,32	432
Kep. Riau	98,67	74	98,81	83	98,74	157
J A M B I	94,97	151	96,89	156	95,94	307
Sumatera Selatan	94,74	306	94,12	240	94,46	546
Bangka Belitung	94,06	95	90,59	77	92,47	172

Bengkulu	97,32	145	98,29	115	97,74	260
Lampung	94,72	251	93,78	211	94,29	462
Kalimantan Barat	87,55	211	93,86	214	90,62	425
Kalimantan Tengah	91,62	153	94,05	158	92,84	311
Kalimantan Selatan	93,72	179	93,79	166	93,75	345
Kalimantan Timur	97,76	131	97,56	120	97,67	251
Kalimantan Utara	94,92	56	97,14	68	96,12	124
Sulawesi Utara	96,12	198	95,50	191	95,81	389
Gorontalo	89,16	74	93,55	87	91,48	161
Sulawesi Tengah	87,98	205	98,14	211	92,86	416
Sulawesi Selatan	92,01	426	96,30	416	94,08	842
Sulawesi Barat	88,29	98	94,39	101	91,28	199
Sulawesi Tenggara	93,75	240	95,09	213	94,38	453
M A L U K U	96,68	204	96,04	194	96,37	398
Maluku Utara	96,97	128	97,32	145	97,15	273
B A L I	97,93	142	98,52	133	98,21	275
Nusa Tenggara Barat	96,63	172	97,78	176	97,21	348
Nusa Tenggara Timur	94,93	412	95,26	382	95,09	794
Papua	77,44	278	81,18	207	78,99	485
Papua Barat	92,96	132	98,99	98	95,44	230

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Tabel 3.7 memberikan informasi ke dalam kelompok yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi berdasarkan pendidikan sekolah menengah pertama.

- Berdasarkan usia tingkat partisipasi SMP, usia 13 tahun merupakan usia puncak dalam pendidikan menengah pertama karena sebagian besar anak-anak berusia 13 tahun merupakan siswa yang melanjutkan dari pendidikan SD ke SMP.

- Semakin lanjut usia di SMP, maka semakin sedikit/kecil tingkat partisipasinya.
- Terdapat kesenjangan yang lebih besar antar provinsi di Indonesia pada tingkat partisipasi sekolah menengah pertama. Terdapat tiga provinsi yang memiliki tingkat partisipasi terendah, yaitu Papua, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 78,99%; 90,62%; dan 91,28%.

Tabel 3.8 Persentase anak putus sekolah berumur 7-12 tahun berdasarkan usia dan jenis kelamin

Usia	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Persentase	Jumlah Anak	Persentase	Jumlah Anak	Persentase	Jumlah Anak
7						
8	0,03	1			0,02	1
9	0,67	20			0,35	20
10	0,03	1	0,03	1	0,03	2
11	0,17	5	0,15	4	0,16	9
12	1,01	30	0,36	10	0,69	40

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Tabel 3.8 memberi informasi ke dalam kelompok yang memiliki tingkat anak putus sekolah berumur 7-12 tahun.

- Berdasarkan usia tingkat putus sekolah SD, usia 12 tahun merupakan usia puncak dalam persentase anak putus sekolah sebesar 0,69%. Untuk laki-laki, usia 12 tahun sebesar 1,01% sedangkan perempuan, usia 12 tahun sebesar 0,36% merupakan usia dimana persentase tertinggi untuk anak sekolah dasar.

Tabel 3.9 Persentase anak putus sekolah berumur 13-15 tahun berdasarkan usia dan jenis kelamin

Usia	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Persentase	Jumlah Anak	Persentase	Jumlah Anak	Persentase	Jumlah Anak
13	0,47	13	0,40	10	0,43	23
14	3,88	108	2,53	66	3,23	174
15	10,35	314	7,12	194	8,82	508

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Tabel 3.9 memberi informasi ke dalam kelompok yang memiliki tingkat anak putus sekolah berumur 13-15 tahun.

- Berdasarkan usia tingkat putus sekolah SMP, usia 15 tahun merupakan usia puncak dalam persentase anak putus sekolah sebesar 8,82%. Untuk laki-laki, usia 15 tahun sebesar 10,35% sedangkan perempuan, usia 15 tahun sebesar 7,12% merupakan usia dimana persentase tertinggi untuk anak sekolah.

Tabel 3.10 Persentase anak putus sekolah berumur 7-18 tahun yang tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi berdasarkan alasan utama tidak bersekolah

Alasan Utama Tidak Bersekolah	7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tidak ada alasan	31.767	92,34	15.147	92,02	12.337	92,06
Tidak ada biaya sekolah	671	1,95	352	2,14	268	2,00
Bekerja/mencari nafkah	632	1,84	327	1,99	263	1,96
Menikah	319	0,93	142	0,86	118	0,88
Mengurus rumah tangga	176	0,51	85	0,52	79	0,59
Merasa pendidikan cukup	293	0,85	143	0,87	90	0,67
Malu karena ekonomi	30	0,09	10	0,06	15	0,11
Sekolah jauh	60	0,17	27	0,16	32	0,24
Cacat/disabilitas	48	0,14	19	0,12	22	0,16
Lainnya	408	1,19	208	1,26	177	1,32
Jumlah	34.404	100,00	16.460	100,00	13.401	100,00

Sumber: Perhitungan berdasarkan SUSENAS MSBP 2015

Tabel 3.10 memberi informasi ke dalam kelompok yang memiliki tingkat anak putus sekolah berumur 7-18 tahun.

- Berdasarkan usia tingkat putus sekolah, usia 7-18 tahun persentase terbesar adalah tidak ada alasan dan persentase terkecil adalah malu karena ekonomi. Pada usia 13-18 tahun, untuk tidak ada alasan dan malu karena ekonomi cenderung menurun.

## **E. Anak tidak sekolah dan keterlibatan dalam pekerja anak**

Pekerja anak merupakan konsep hukum daripada statistik, dan oleh karena itu standar hukum internasional yang mendefinisikannya adalah kerangka acuan yang diperlukan untuk statistik pekerja anak. Tiga konvensi utama internasional tentang pekerja anak mengatur batas-batas hukum untuk pekerja anak dan memberikan dasar hukum bagi tindakan nasional dan internasional terhadap hal tersebut:

- Konvensi ILO No. 138 (Usia Minimum) (C138)
- Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC); dan
- Konvensi ILO No. 182 (Bentuk Terburuk) (C182)

Akan tetapi terjemahan dari norma-norma hukum ke dalam istilah statistik untuk keperluan pengukuran ini tidak berarti mudah. Standar hukum internasional mengandung sejumlah klausul fleksibilitas yang diserahkan kepada kebijakan dari otoritas nasional yang kompeten dalam kesepakatan perundingan (jika relevan) dengan organisasi pekerja dan pengusaha (misalnya, usia minimum, ruang lingkup aplikasi). Ini berarti bahwa tidak ada definisi hukum tunggal pekerja anak di seluruh negara, dan secara bersamaan, tidak ada ukuran statistik standar tunggal dari pekerja anak sesuai dengan perundang-undangan nasional di seluruh negara.

Resolusi pada statistik pekerja anak yang diadopsi pada Konferensi Internasional ke-18 dari Statistik Tenaga Kerja tahun 2008 (ICLS atau *International Conference of Labour Statisticians*) menetapkan pertama kalinya standar global untuk menerjemahkan standar hukum internasional tentang pekerja anak ke dalam istilah statistik (lihat

<http://www.ilo.org/ipecc/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--en/index.htm>).

Resolusi ICLS menyatakan bahwa pekerja anak dapat diukur dalam hal keterlibatan anak-anak dalam kegiatan produktif atas dasar batas produksi umum. Batas produksi umum adalah konsep yang luas mencakup semua kegiatan yang kinerjanya dapat didelegasikan kepada orang lain dengan hasil yang diinginkan sama. Ini termasuk layanan rumah tangga yang belum dibayar (pekerjaan rumah tangga) yang berada di luar sistem yang lebih sempit batas produksi Neraca Nasional (SNA atau *System of National Account*).

Berdasarkan pedoman pengukuran yang terkandung dalam resolusi ICLS 18, dan membatasi ruang lingkup untuk anak-anak sampai dan termasuk 14 tahun (usia batas atas yang paling umum untuk sekolah dasar), ukuran pekerja anak yang digunakan dalam laporan ini terdiri dari tiga kelompok anak:

- Usia 5-11 tahun usia dalam kegiatan ekonomi (yaitu, mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berada dalam batas produksi Neraca Nasional untuk setidaknya satu jam selama seminggu). Kegiatan ekonomi meliputi anak-anak di seluruh produksi pasar dan dalam beberapa jenis produksi non-pasar, termasuk produksi barang untuk digunakan sendiri. Ini termasuk bentuk pekerjaan baik di sektor formal maupun informal, serta bentuk-bentuk pekerjaan baik di dalam dan pengaturan di luar keluarga;
- Usia 12-14 tahun dalam aktivitas ekonomi yang tidak ringan (atau "regular") yaitu, mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berada

dalam batas produksi Neraca Nasional untuk setidaknya 14 jam selama referensi minggu); dan

- Usia 5-14 tahun yang berstatus sebagai pembantu rumah tangga penuh resiko (yaitu, mereka yang terlibat dalam produksi jasa domestik dan pribadi untuk konsumsi dalam rumah tangga mereka sendiri, yang biasa disebut "pekerjaan rumah tangga") untuk setidaknya 28 jam selama seminggu.

Definisi pekerja anak dalam penelitian ini meliputi:

- Semua bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak 11 tahun atau lebih muda.
- Semua bentuk kecuali 'pekerjaan ringan' yang dilakukan oleh anak-anak berusia 12-14 tahun.
- Semua 'bentuk-bentuk terburuk' dari pekerja anak yang dilakukan oleh anak-anak 18 tahun atau lebih muda di mana bentuk-bentuk terburuk termasuk aktivitas atau pekerjaan yang menurut sifat atau tipe, memiliki atau mengarah ke efek buruk pada keselamatan anak, kesehatan dan perkembangan moral.

Indikator ini merupakan patokan untuk tujuan perbandingan internasional, tetapi belum tentu konsisten dengan (berdasarkan perkiraan) legislasi nasional tentang pekerja anak karena ketentuan fleksibilitas yang terkandung dalam standar hukum internasional.

## Sumber Data

Statistik Informasi dan Program Monitoring Pekerja Anak (SIMPOC atau *Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour*) diluncurkan pada tahun 1998 oleh ILO/IPEC untuk membantu menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif sebanding komprehensif dan terpercaya tentang pekerja anak dalam segala bentuknya. Dalam kerangka SIMPOC, Survey 2009 Indonesia Pekerja Anak (ICLS) adalah sub-sampel dan terintegrasi dalam Survei Angkatan Kerja Nasional 2009 (Sakernas). ICLS dilakukan karena keterbatasan data Sakernas. Keterbatasan tersebut antara lain:

- Sakernas, survei dua tahunan yang didedikasikan khusus untuk masalah tenaga kerja, tidak mengumpulkan data tentang angkatan kerja untuk anak-anak berusia di bawah 10; dan
- Jumlah pertanyaan tentang pekerja anak di Sakernas dianggap terlalu sedikit untuk memberikan informasi yang tepat tentang karakteristik sosial ekonomi pekerja anak.
- Kuesioner bersifat manual dan konsep dasar yang digunakan dalam ICLS pada dasarnya diadopsi dari yang direkomendasikan oleh IPEC. Istilah pekerja anak merujuk pada istilah yang lebih teknis 'anak-anak dalam pekerjaan'. Usia masuk resmi ke sekolah dasar di Indonesia adalah 7 tahun. 2009 ICLS (SIMPOC) tidak mencakup informasi tentang kehadiran sekolah di TK atau lembaga informal. Seorang anak didefinisikan untuk keluar dari sekolah jika dia/dia tidak 'masih di sekolah'.

## Hasil Temuan

Semua tabel di bagian ini didasarkan pada CLS Indonesia 2009.

Insiden pekerja anak sedikit lebih tinggi di kalangan perempuan, meskipun proporsi anak laki-laki berusia 12-14 tahun yang terlibat dalam beberapa kegiatan ekonomi lebih tinggi (5,1% dibandingkan dengan 3,9% untuk anak perempuan). Hanya 13 % dari anak laki-laki atau perempuan berusia 12-14 tahun yang terlibat dalam beberapa kegiatan ekonomi yang sebenarnya terlibat dalam pekerjaan yang dibayar. Pekerja anak secara umum terdapat dua kali lebih banyak di daerah pedesaan daripada di perkotaan. Proporsi pekerja anak yang menghadiri sekolah hampir sama dengan proporsi anak sekolah (4%). Namun pekerja anak berkorelasi negatif dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Mengingatkan bahwa ukuran sampel sangat kecil, pesan utamanya adalah bahwa anak bekerja lebih mungkin untuk keluar dari sekolah jika kepala rumah tangga memiliki sedikit atau tidak ada pendidikan.

Tabel 3.11 menyediakan profil dari anak-anak sekolah sesuai dengan 2009 CLS kecuali bahwa kelompok usia tumpang tindih hanya sebagian (umur yaitu 5-14 tahun daripada kelompok 7-12 dan 13-15 tahun masing-masing). Tidak mengherankan, hasilnya adalah pada hubungan kehadiran di sekolah dengan pendidikan orang tua yang sangat mirip. Sisi kanan memberikan wawasan tentang sejauh mana dari anak-anak sekolah yang terlibat sebagai pekerja anak. Hasil yang paling menarik adalah bahwa satu dari lima dari anak-anak sekolah yang berusia 12-14 tahun merupakan pekerja anak.

Tabel 3.11 berfokus pada anak-anak sekolah usia 5-14 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan mencoba untuk memetakan perilaku dan menyarankan apakah karakteristik individu tertentu terkait dengan jenis tertentu dari aktivitas. Dengan peringatan bahwa ukuran sampel kecil, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pekerjaan yang dibayar lebih umum untuk bekerja dari anak-anak sekolah (i) yang tinggal di perkotaan daripada di daerah pedesaan dan (ii) yang orang tuanya tidak berpendidikan daripada berpendidikan. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang dibayar harus dimasukkan ke dalam lebih dari 40 jam per minggu. Akhirnya, itu adalah tiga kali lebih mungkin untuk anak perempuan daripada anak laki-laki untuk menjadi wiraswasta .

Anak yang bekerja cenderung terlibat terutama dalam kegiatan pertanian. Namun, menurut Tabel 3.11, hal ini jauh lebih mungkin menjadi kasus untuk anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan (sedangkan manufaktur dan jasa merupakan sektor umum kerja di daerah perkotaan).

Kolom tengah Tabel 3.11 menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang berpendidikan dari rumah tangga lebih mungkin untuk memutuskan bahwa seorang anak yang bekerja juga menghadiri sekolah (tingkat partisipasi di sekolah adalah 80% untuk anak-anak dari kepala tidak berpendidikan tetapi 93% untuk anak-anak dari kepala dengan pendidikan menengah atas). Pesan utama adalah bahwa pekerja anak tidak mempengaruhi probabilitas berada di sekolah.

Tabel 3.11 Pekerja Anak

Persentase anak-anak dengan keterlibatan dalam aktivitas dan rumah tangga ekonomi pekerjaan selama seminggu yang lalu, menurut kelompok umur, dan persentase anak usia 5-14 terlibat dalam pekerja anak	Persentase anak-anak berusia 5-11 terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk setidaknya satu jam				Persentase anak-anak berusia 12-14 terlibat dalam kegiatan ekonomi selama 14 jam atau lebih				Persentase anak-anak usia 5-14 yang terlibat di dalam		
	pekerjaan yang dibayar	kerja rumah tangga yang tidak dibayar	wirausaha	Total	pekerjaan yang dibayar	kerja rumah tangga yang tidak dibayar	wirausaha	Total	kegiatan ekonomi untuk setidaknya satu jam	pekerjaan rumah tangga selama 28 jam atau lebih	Pekerja anak
<b>Jenis Kelamin</b>											
Laki-laki	0.0	2.8	0.2	3.0	0.7	4.1	0.0	5.1	5.4	0.2	3.8
Perempuan	0.2	2.7	0.4	3.2	0.5	3.2	0.2	3.9	4.9	0.9	4.3
<b>Wilayah</b>											
Pedesaan	0.1	3.5	0.3	3.9	0.6	1.7	0.1	2.4	6.4	0.7	5.1
Perkotaan	0.1	1.1	0.2	1.4	0.6	5.0	0.3	5.9	2.6	0.3	2.1
<b>Kehadiran di Sekolah</b>											
Tidak	0.0	0.6	0.3	0.9	4.5	11.3	1.8	17.6	3.7	1.0	4.1
Ya	0.1	3.3	0.3	3.7	0.3	3.1	0.1	3.6	5.4	0.5	3.9
<b>Pendidikan Kepala Rumah Tangga</b>											
Tidak ada	0.1	8.2	0.2	8.5	0.9	4.9	1.9	7.6	10.2	0.8	9.0
SD	0.1	2.6	0.4	3.1	1.0	3.5	0.2	4.6	5.3	0.7	4.2
SMP	0.0	2.2	0.3	2.4	0.2	3.7	0.1	4.0	4.6	0.4	3.3
SM	0.4	2.1	0.0	2.3	0.3	4.1	0.1	4.5	4.1	0.3	3.2
Universitas	0.0	1.9	0.3	2.2	0.0	2.1	0.0	2.1	3.8	0.1	2.3
<b>Total</b>	0.1	2.8	0.3	3.1	0.6	3.7	0.3	4.5	5.2	0.6	4.1

Sumber: Indonesia CLS 2009 (SIMPOC)

Tabel 3.12 Pekerja Anak dan Anak Tidak Sekolah

Persentase anak usia 5-14 tahun terlibat dalam pekerja anak yang putus sekolah	Pekerja anak		Pekerja anak yang berada di luar sekolah *	
	Persentase	Ukuran Sampel	Persentase	Ukuran Sampel
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	3.8	457	15.3	87
Perempuan	4.3	368	15.2	43
<b>Wilayah</b>				
Pedesaan	5.1	740	14.4	116
Perkotaan	2.0	85	19.3	14
<b>Usia</b>				
5-11 tahun	3.4	447	8.1	28
12-14 tahun	5.6	378	25.7	102
<b>Pendidikan Kepala Rumah Tangga</b>				
Tidak ada	9.0	106	20.1	28
SD	4.2	422	18.0	76
SMP	3.3	124	12.1	16
SM	3.2	141	7.0	9
Universitas	2.3	32	2.3	1
<b>Total</b>	<b>4.1</b>	<b>825</b>	<b>15.3</b>	<b>130</b>

Sumber: Indonesia CLS 2009 (SIMPOC) \* Pembilang untuk memperkirakan persentase anak pekerja anak yang berada di luar sekolah termasuk anak-anak usia 5-14 tahun dari sekolah yang selama minggu sebelumnya survei, terlibat dalam pekerja anak. penyebut adalah jumlah total anak pekerja anak.

Tabel 3.13 Anak tidak sekolah dan pekerja anak

Persentase dari anak-anak sekolah usia 5-14 tahun terlibat dalam pekerja anak	Anak tidak sekolah		Anak-anak sekolah, yang berada di pekerja anak *	
	Persentase	Ukuran Sampel	Persentase	Ukuran Sampel
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	16.5	955	3.5	87
Perempuan	15.6	766	4.2	43
<b>Wilayah</b>				
Pedesaan	17.8	1,449	4.1	116
Perkotaan	12.4	272	3.2	14
<b>Usia</b>				
5-11 tahun	19.9	1,442	1.4	28
12-14 tahun	6.8	279	21.7	102
<b>Pendidikan Kepala Rumah Tangga</b>				
Tidak ada	23.6	214	7.6	28
SD	18.2	935	4.2	76
SMP	12.3	229	3.3	16
SM	13.2	276	1.7	9
Universitas	9.1	67	0.6	1
<b>Total</b>	<b>16.0</b>	<b>1,721</b>	<b>3.9</b>	<b>130</b>

Sumber: Indonesia CLS 2009 (SIMPOC) \* Pembilang untuk memperkirakan persentase anak-anak dari sekolah yang terlibat dalam pekerja anak termasuk anak-anak usia 5-14 dari sekolah yang selama minggu sebelumnya survei, terlibat dalam pekerja anak. penyebut adalah jumlah total dari anak-anak sekolah.

Tabel 3.14 Anak tidak sekolah: keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dan pekerjaan rumah tangga

Persentase anak tidak sekolah usia 5-14 bekerja di kegiatan ekonomi dan pekerjaan rumah tangga dengan jenis pekerjaan dan rata-rata satu jam	Aktivitas Ekonomi *										Ukuran sampel dari anak-anak sekolah yang terlibat dalam kegiatan ekonomi selama setidaknya 1 jam
	Pekerjaan yang dibayar		Pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar		Wirausaha		Total		Pekerjaan rumah tangga		
	Persentase	Rata-rata jam	Persentase	Rata-rata jam	Persentase	Rata-rata jam	Persentase	Rata-rata jam	Persentase	Rata-rata jam	
<b>Jenis Kelamin</b>											
Laki-laki	18.9	38.4	74.2	19.9	6.9	35.0	4.5	24.4	9.0	5.5	103
Perempuan	13.1	50.5	66.4	15.1	20.5	28.6	2.8	22.5	16.4	12.6	43
<b>Wilayah</b>											
Pedesaan	12.6	37.2	75.9	18.8	11.4	27.7	4.1	22.2	12.2	10.3	132
Perkotaan	37.3	49.7	48.8	13.7	13.9	44.4	2.4	31.4	13.5	8.8	14
<b>Usia</b>											
5-11 tahun	2.9	37.0	69.0	10.6	28.1	24.7	0.9	15.3	6.5	7.9	25
12-14 tahun	20.5	42.0	72.0	20.2	7.5	37.3	24.0	26.0	55.4	11.5	121
<b>Pendidikan Kepala Rumah Tangga</b>											
Tidak ada	9.0	33.7	71.5	15.7	19.5	35.0	7.3	21.1	17.4	10.2	31
SD	18.6	37.2	69.5	19.1	11.9	29.2	4.0	23.7	13.3	10.4	89
SMP	16.1	45.8	83.9	24.7	0.0	0.0	2.5	28.1	11.3	10.0	14
SM	24.0	74.5	68.8	12.0	7.2	28.0	1.9	28.1	8.2	8.4	10
Universitas	0.0	0.0	100	10.5	0.0	0.0	1.4	10.5	10.6	4.5	2
<b>Total</b>	<b>16.8</b>	<b>41.8</b>	<b>71.4</b>	<b>18.3</b>	<b>11.9</b>	<b>31.0</b>	<b>3.7</b>	<b>23.7</b>	<b>12.5</b>	<b>9.9</b>	<b>146</b>

Sumber: Indonesia CLS 2009 (SIMPOC) \* pembilang untuk memperkirakan persentase dan rata-rata jam aktivitas ekonomi untuk keluar dari anak-anak sekolah usia 5-14 tahun meliputi: dari anak-anak sekolah usia 5-14 yang, selama minggu sebelum survei yang melakukan setidaknya satu jam dari kegiatan ekonomi di pekerjaan yang dibayar, belum dibayar / keluarga pertanian-bisnis atau wirausaha.

Temuan ini konsisten dengan yang dilaporkan oleh Priyambada, dkk (2005) berdasarkan data dari survei 100 desa pasca krisis keuangan 1997-1998. Pekerja anak sebagian besar merupakan fenomena pedesaan dan pertanian dan sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Selain itu, pekerja anak adalah kelompok yang paling miskin di antara anak-anak yang lain. Namun, dengan bekerja tidak selalu sepenuhnya menghilangkan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan formal, karena hanya setengah dari pekerja anak dalam sampel yang tidak bersekolah. Namun demikian, anak-anak yang bekerja memiliki probabilitas 30% lebih rendah untuk menghadiri sekolah daripada mereka yang tidak bekerja. Perbedaan antara pekerja anak yang bersekolah dan mereka yang tidak juga terkait dengan kemiskinan. Temuan ini mendukung gagasan bahwa ada lingkaran setan antara kemiskinan dan pekerja anak.

Di NTT, anak-anak diketahui bekerja sebagai petani di ladang atau sawah, penggembala, tukang ojek, kondektur angkutan umum, atau pedagang keliling. Di Jawa Barat, anak-anak juga mungkin diperlukan untuk bekerja sebagai nelayan atau buruh (pekerja pabrik genteng, buruh pabrik pakaian, pekerja rumah tangga, penjaga toko), buruh migran, pedagang dan pemulung di Jakarta, atau pengamen.

Tabel 3.15 Anak tidak sekolah dalam aktivitas ekonomi berdasarkan sektor pekerjaan

Persentase anak tidak sekolah yang berusia 5-14 dalam kegiatan ekonomi berdasarkan sektor pekerjaan	Aktivitas ekonomi *					Ukuran sampel dari anak-anak sekolah dalam kegiatan ekonomi selama setidaknya 1 jam
	Pertanian	Pabrik	Perdagangan	Layanan	Lain-lain	
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	73.7	4.6	1.9	9.6	10.2	103
Perempuan	68.6	8.3	8.8	14.4	0.0	43
<b>Wilayah</b>						
Pedesaan	76.4	2.5	3.4	9.9	7.8	132
Perkotaan	49.3	23.0	9.1	18.7	0.0	14
<b>Usia</b>						
5-11 tahun	84.1	0.0	5.3	3.0	7.6	25
12-14 tahun	68.5	7.5	4.1	13.6	6.2	121
<b>Pendidikan Kepala Rumah Tangga</b>						
Tidak ada	89.0	7.9	0.0	0.0	3.1	31
SD	67.8	5.7	6.3	12.6	7.7	89
SMP	79.3	9.8	4.6	0.0	6.2	14
SM	58.3	0.0	0.0	41.7	0.0	10
Universitas	58.7	0.0	0.0	0.0	41.3	2
<b>Total</b>	<b>71.9</b>	<b>5.9</b>	<b>4.4</b>	<b>11.3</b>	<b>6.5</b>	<b>146</b>

Sumber: Indonesia CLS 2009 (SIMPOC)

Klasifikasi sektor pekerjaan didasarkan pada ISIC rev.3.1.

Tabel 3.16 Kehadiran di sekolah dan pekerja anak

Persentase anak usia 5-14 tahun bersekolah yang terlibat dalam pekerja anak	Anak masuk sekolah		Anak yang bekerja dan anak yang bersekolah <sup>1</sup>		Anak tidak bekerja dan anak yang bersekolah <sup>2</sup>	
	Percentase	Ukuran sampel	Percentase	Ukuran sampel	Percentase	Ukuran sampel
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	83.5	4,586	84.7	370	83.4	4,190
Perempuan	84.4	4,326	84.8	325	84.4	3,984
<b>Wilayah</b>						
Pedesaan	82.2	7,202	85.6	624	82.0	6,537
Perkotaan	87.6	1,710	80.7	71	87.8	1,637
<b>Usia</b>						
5-11 tahun	80.1	6,019	91.9	419	79.7	5,581
12-14 tahun	93.2	2,893	74.3	276	94.5	2,593
<b>Pendidikan Kepala Rumah Tangga</b>						
Tidak ada	76.4	556	79.9	78	75.8	472
SD	81.8	4,505	82.0	346	81.8	4,139
SMP	87.7	1,532	87.9	108	87.6	1,409
SM	86.8	1,777	93.0	132	86.6	1,643
Universitas	90.9	542	97.7	31	90.7	511
<b>Total</b>	<b>84.0</b>	<b>8,912</b>	<b>84.7</b>	<b>695</b>	<b>83.9</b>	<b>8,174</b>

1. Pembilang untuk memperkirakan persentase anak pekerja anak yang menghadiri sekolah termasuk anak-anak berusia 5-14 tahun bersekolah yang, selama seminggu sebelum survei, terlibat dalam pekerja anak penyebut adalah jumlah anak pekerja anak.

2. Pembilang untuk memperkirakan persentase anak tidak terlibat dalam pekerja anak yang menghadiri sekolah termasuk anak-anak berusia 5-14 tahun bersekolah yang, selama minggu sebelum survei tersebut, tidak terlibat dalam pekerja anak. Penyebut adalah jumlah anak tidak menjadi pekerja anak.

## **F. Profil dari Anak yang Beresiko Putus di Dimensi 4 dan 5**

Dimensi 4 dan 5 merujuk kepada anak-anak yang berada di sekolah tetapi berisiko putus. Untuk itu, berikut aspek sistem pendidikan diperiksa di bagian ini:

- Paparan pendidikan anak usia dini: dianggap bahwa pengalaman pendidikan anak usia dini dapat memiliki efek positif yang kuat pada daya ingat.
- Efisiensi internal, yaitu pengulangan, kelangsungan hidup, lulus, transisi dan putus sekolah. Idennya adalah bahwa melihat lebih dekat pada jalur anak melalui sistem pendidikan dasar dan menengah pertama (dan karakteristik yang terkait dengan perkembangan mulus dari satu kelas ke yang lain) bisa membantu memprediksi apakah anak-anak cenderung terganggu pendidikan mereka sebelum waktunya.
- Input: asumsi umum adalah bahwa sistem pendidikan dengan sumber daya berada dalam posisi yang lebih baik untuk memastikan bahwa anak-anak, sekali di sekolah, dapat menyelesaikan siklus pendidikan.

Berbeda dengan bagian sebelumnya, yang mengandalkan bukti dari survei rumah tangga, sumber informasi dalam bagian ini cenderung sensus tahunan sekolah. Hal ini terutama karena sensus sekolah diakui sebagai sumber informasi resmi tentang indikator efisiensi internal.

Tabel 3.17 Angka Mengulang oleh kelas di tingkat SD dan SMP

	SD					SMP			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jenis Kelamin									
Laki-laki	1.64	2.26	1.88	1.42	0.94	0.07	0.43	0.31	0.14
Perempuan	1.61	2.54	2.11	1.57	1.03	0.07	0.22	0.16	0.11
Provinsi									
DKI Jakarta	4.77	0.90	0.89	0.84	0.62	0.03	0.41	0.31	0.08
Jawa Barat	1.74	0.90	0.66	0.47	0.33	0.02	0.08	0.07	0.03
Banten	2.68	2.47	1.63	0.84	0.49	0.02	0.25	0.21	0.09
Jawa Tengah	1.27	2.96	2.16	1.90	1.25	0.02	0.19	0.14	0.09
DI Yogyakarta	1.24	1.88	1.69	1.56	1.26	0.08	0.28	0.22	0.12
Jawa Timur	1.18	2.38	1.38	1.10	0.67	0.03	0.17	0.14	0.08
Aceh	1.35	3.80	2.25	1.66	1.05	0.08	0.59	0.56	0.27
Sumatera Utara	0.96	2.01	1.27	0.75	0.41	0.03	0.38	0.19	0.1
Sumatera Barat	1.52	4.97	4.31	3.85	3.06	0.08	0.73	0.53	0.14
R i a u	1.80	1.64	1.50	1.08	0.87	0.07	0.79	0.47	0.13
Kep. Riau	1.82	2.82	2.65	2.17	1.96	0.34	0.86	0.51	0.17
J a m b i	1.55	4.14	2.69	1.51	0.99	0.07	0.8	0.66	0.19
Sumatera Selatan	1.35	3.11	1.84	1.04	0.58	0.08	0.45	0.44	0.2
Bangka Belitung	1.32	6.46	6.15	4.94	4.07	0.30	0.99	0.7	0.2
Bengkulu	1.46	4.05	3.09	1.86	1.41	0.12	0.94	0.69	0.21
Lampung	0.93	1.97	1.68	1.04	0.63	0.07	0.3	0.31	0.16
Kalimantan Barat	1.32	8.55	4.60	3.41	2.52	0.04	0.59	0.51	0.26
Kalimantan Tengah	3.22	4.52	2.50	1.36	0.85	0.09	0.34	0.31	0.11
Kalimantan Selatan	1.71	5.58	3.51	2.24	1.38	0.15	0.66	0.5	0.15
Kalimantan Timur	3.30	3.77	2.97	2.10	1.41	0.12	0.31	0.17	0.07
Kalimantan Utara	2.56	4.96	3.47	2.26	1.54	0.10	0.31	0.61	0.2
Sulawesi Utara	1.59	2.04	1.30	0.81	0.65	0.21	0.44	0.31	0.15
Gorontalo	1.64	6.71	4.82	3.32	2.59	0.08	0.8	0.65	0.47
Sulawesi Tengah	1.73	5.17	3.79	2.29	1.66	0.10	0.75	0.52	0.33
Sulawesi Selatan	1.24	2.97	2.22	1.50	1.08	0.03	0.37	0.22	0.14
Sulawesi Barat	1.12	4.52	3.09	1.62	1.15	0.06	0.49	0.31	0.15
Sulawesi Tenggara	1.53	3.61	2.98	2.00	1.46	0.13	0.71	0.52	0.48
M a l u k u	1.03	0.92	0.71	0.35	0.22	0.11	0.74	0.57	0.36
Maluku Utara	1.52	2.38	1.37	0.67	0.48	0.19	0.81	0.5	0.29

B a l i	0.82	1.97	1.42	0.85	0.35	0.16	0.18	0.06	0.02
Nusa Tenggara Barat	0.93	2.80	2.23	1.40	1.06	0.08	0.48	0.28	0.21
Nusa Tenggara Timur	1.25	6.68	5.15	3.30	2.19	0.17	0.4	0.24	0.21
Papua	2.02	3.97	3.12	1.56	1.29	0.46	0.98	0.65	0.6
Papua Barat	1.77	7.16	4.33	2.14	2.05	0.99	1.03	0.69	0.27
Indonesia	1.58	2.70	1.94	1.39	0.94	0.06	0.32	0.25	0.13

Sumber: Kemendikbud (2015)

Tabel 3.17 memberikan informasi angka mengulang kelas tingkat SD dan SMP berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan provinsi. Angka Mengulang tertinggi terjadi pada saat kelas 2 sekolah dasar. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan banyaknya siswa yang data ke sekolah hanya mengetahui bahasa lokal sehingga terjadi kesulitan dengan Bahasa Indonesia sebagai pengantar. Faktor yang selanjutnya adalah jam sekolah yang pendek untuk tahun pertama pada sekolah dasar.

Tabel 3.18 Angka putus sekolah menurut tingkat dan jenis kelamin di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

	SD					SMP			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jenis Kelamin									
Laki-laki	0.80	0.84	0.75	0.72	0.71	0.43	0.92	1.15	0.98
Perempuan	0.77	0.79	0.68	0.64	0.58	0.34	3.10	0.66	0.80
Provinsi									
DKI Jakarta	0.69	0.95	0.90	0.84	0.72	0.43	0.98	0.87	0.43
Jawa Barat	0.73	0.94	0.81	0.77	0.76	0.43	0.97	1.18	1.19
Banten	0.74	0.99	0.83	0.60	0.57	0.34	0.93	1.09	0.78
Jawa Tengah	0.36	0.44	0.31	0.29	0.27	0.12	0.56	0.60	0.37
DI Yogyakarta	0.37	0.49	0.43	0.40	0.29	0.09	0.33	0.31	0.21
Jawa Timur	0.34	0.52	0.36	0.36	0.32	0.18	0.67	0.80	0.6
Aceh	0.97	1.41	0.88	0.80	0.79	0.41	1.33	1.46	0.96
Sumatera Utara	0.92	1.09	0.82	0.72	0.68	0.40	0.65	0.83	0.73
Sumatera Barat	0.76	0.89	0.69	0.61	0.58	0.21	0.86	0.86	0.42

R i a u	0.99	1.37	1.16	0.85	0.84	0.37	0.85	0.95	0.51
Kep. Riau	0.96	1.17	0.89	0.84	0.97	0.39	1.09	0.95	0.46
J a m b i	1.18	1.71	1.16	0.98	0.95	0.52	0.88	1.48	0.89
Sumatera Selatan	1.17	1.25	0.79	0.69	0.70	0.46	0.66	0.85	0.66
Bangka Belitung	0.81	0.76	0.61	0.64	0.57	0.30	0.94	1.06	0.32
Bengkulu	0.99	1.04	0.82	0.62	0.63	0.31	0.66	1.12	0.55
Lampung	0.71	0.71	0.58	0.54	0.52	0.33	0.65	1.01	1.03
Kalimantan Barat	1.01	1.14	0.62	0.59	0.66	0.40	0.92	1.26	0.74
Kalimantan Tengah	1.32	1.88	1.17	0.91	0.93	0.50	1.28	1.73	1.24
Kalimantan Selatan	0.77	1.09	0.88	0.71	0.60	0.35	0.72	0.90	0.61
Kalimantan Timur	1.09	1.33	1.05	0.99	0.87	0.36	0.95	1.14	0.57
Kalimantan Utara	1.07	1.06	1.08	0.87	0.90	0.53	1.16	1.78	1.66
Sulawesi Utara	1.11	1.09	0.86	0.80	0.75	0.47	0.8	1.01	1.12
Gorontalo	0.73	0.92	0.72	0.69	0.84	0.31	0.81	1.13	0.62
Sulawesi Tengah	0.98	1.37	1.00	0.91	0.92	0.61	0.82	1.17	0.92
Sulawesi Selatan	0.82	1.01	0.89	0.92	0.89	0.76	0.88	1.40	1.34
Sulawesi Barat	0.91	1.24	1.08	0.80	0.82	1.05	1.22	1.62	1.89
Sulawesi Tenggara	1.37	1.43	1.15	1.04	1.13	1.00	0.97	1.31	1.73
M a l u k u	1.32	0.97	0.75	0.54	0.66	0.90	0.79	0.99	1.37
Maluku Utara	2.36	1.37	0.86	0.57	0.92	0.97	0.89	1.6	1.28
B a l i	0.36	0.49	0.38	0.36	0.35	0.17	0.62	0.55	0.4
Nusa Tenggara Barat	0.72	0.74	0.51	0.49	0.47	0.33	0.74	0.89	0.85
Nusa Tenggara Timur	1.08	0.93	0.63	0.51	0.60	0.39	1.25	1.46	0.97
Papua	2.13	1.88	1.53	1.13	1.15	1.00	1.52	1.8	1.71
Papua Barat	2.34	2.67	2.00	1.13	1.57	1.36	1.36	2.02	1.48
Total	0.77	0.93	0.70	0.64	0.62	0.37	0.80	1.00	0.83

Sumber: Kemdikbud (2015)

Tabel 3.18 memberikan informasi tingkat putus sekolah berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan provinsi. Untuk laki-laki tingkat putus sekolah paling tinggi terdapat pada kelas 8 sebesar 1,15% sedangkan untuk perempuan terdapat pada kelas 7 sebesar 3,10%. Pada provinsi Papua Barat tingkat tertinggi anak putus sekolah sebesar 2,67% di kelas 2 jenjang sekolah dasar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan hasil dan bahasan maka dapat disimpulkan tentang dua poin sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan informasi statistik dan analisis mengenai dari anak-anak putus sekolah dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengecualian dari persekolahan (termasuk beberapa kekurangan yang dan kesenjangan yang secara tidak langsung berhubungan dengan pendidikan); dan menganalisis kebijakan yang ada terkait dengan peningkatan partisipasi sekolah.

##### 1. Dimensi 1

- Anak usia 5 tahun yang telah masuk pendidikan dasar sekitar 10% sedangkan anak usia 6 tahun sekitar 70%
- Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun di pendidikan dasar untuk anak laki-laki di pedesaan sebesar 53,7% dan di perkotaan 67,1% sedangkan untuk anak perempuan di pedesaan sebesar 72,7% dan diperkotaan 70,0%

##### 2. Dimensi 2 dan 3

- Partisipasi sekolah pada jenjang SD mencapai puncaknya pada usia 10 dan 11 tahun sebesar 99%, pada jenjang SMP pada usia 14 tahun sebesar 90% dan pada jenjang SM mencapai puncaknya pada usia 17 tahun sebesar 24,21%.
- Tingkat partisipasi jenjang SD (usia 7-12 tahun) adalah 99,69% dimana untuk anak laki-laki sebesar 99,53% dan anak perempuan 99,86%

- Tingkat partisipasi jenjang SMP usia 13-15 tahun (tidak termasuk anak yang berada dijenjang SD adalah 96,98% dimana untuk anak laki-laki sebesar 96,60% dan anak perempuan 97,39%
  - Tingkat partisipasi SMP usia 13-15 tahun termasuk yang berada di jenjang SD adalah 95,00% dimana untuk anak laki-laki sebesar 94,20% dan anak perempuan 95,91%.
3. Untuk jenjang SD, usia 12 tahun merupakan usia puncak dalam persentase anak putus sekolah sebesar 0,69% sedangkan untuk jenjang SMP, usia 15 tahun merupakan usia puncak dalam persentase anak putus sekolah sebesar 8,82% karena banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SM.
  4. Beberapa alasan yang menyebabkan anak usia 7-15 tahun putus sekolah atau tidak melanjutkan adalah alasan ekonomi dan bekerja untuk mencari nafkah.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, beberapa saran dan kebijakan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Program BOS SM perlu ditingkatkan agar anak-anak yang sudah lulus SMP bisa melanjutkan ke jenjang SM.
2. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti PNPM, PKH dan BLSM perlu ditingkatkan
3. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti temuan-temuan hasil studi tentang anak-anak putus sekolah atau tidak melanjutkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2015. Statistik Pendidikan Survei Sosial Ekonomi Nasional MSBP, 2015. Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2015. Statistik Pendidikan Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR, 2015. Jakarta

Kemendikbud, 2015. Statistik Pendidikan, 2014/2015, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Priyambada A, A Suryahadi dan S Sumarto (2005) What happened to child labor in Indonesia during the economic crisis: the trade-off between school and work, SMERU working paper

United Nations Emergency Children's Fund, 2012. Global Initiative on Out of School Children. Jakarta

Sudarwati. 2009. Perbedaan Resiko Anak Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun pada Tahun 1998 dan 2006 di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia